

## BAB VI PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwasannya peristiwa kudeta Myanmar Tahun 2021 ditandai dengan penangkapan Presiden Wint Myint dan Aung San Suu Kyi. Bahkan, junta militer Myanmar menangkap sejumlah tokoh Partai *The National League for Democracy* (NLD). Kekhawatiran jika Partai NLD menang akan menekan amendemen konstitusi dan demokratisasi. Dari segi sosial-ekonomi, Myanmar dinilai sebagai salah satu negara dengan tingkat infeksi Covid-19 terendah di Asia Timur dan Pasifik. Rendahnya pelaporan infeksi ini disebabkan minimnya fasilitas pengujian yang tersedia di Myanmar. Akan tetapi, kasus Covid-19 mulai melonjak pada kuartal keempat karena pemerintah mulai melakukan peningkatan pengujian. Adanya pandemi Covid-19 di Myanmar serta kudeta militer memberikan dampak besar dalam kondisi sosial-ekonomi dalam negeri. Dari sisi pemerintahan Myanmar, Rezim kudeta militer mencoba memberikan tindakan yang dianggap legal sesuai keputusan pada ketentuan konstitusi dan perundang-undangan. Pada sistem pemerintahan Myanmar di masa kudeta ini terlihat bahwa Panglima menetapkan Dewan Tata Usaha Negara atau *State Administrative Council* (SAC) sesuai dengan Surat Perintah (Commander-in-Chief Order 9/2021, dan SAC Order 14/2021). Pengambilalihan sistem pemerintahan oleh junta militer dengan membentuk *The State Administrative Council* (SAC) yang memiliki kendali penuh terhadap negara.

Dari segi pembahasan, Peran ASEAN terlihat sebagai organisasi regional yang bersistem pada penyelesaian permasalahan secara damai, fleksibel, dan tidak mengganggu kedaulatan nasional. Instrumen ini tentunya terlihat bagus dari segi konsepnya dalam menangani konflik tetapi tidak optimal di tataran implementasinya di lapangan. Penyelesaian sengketa hanya bersifat lunak melalui mekanisme jalur damai tanpa ikut campur tangan karena prinsip nonintervensinya membuat respons ASEAN terkesan lamban yang dimaklumi konsensus, mufakat serta pilihan resolusi konflik secara fleksibel melalui ASEAN Way yang melarang

negara-negara anggota ASEAN untuk ikut campur urusan domestik suatu negara. Dalam konsensusnya terhadap Kudeta Myanmar Tahun 2021, ASEAN cenderung menggunakan proses pendekatan informal dalam mencapai kesepakatan bersama melalui konsultasi (musyawarah dalam bahasa Indonesia) dan konsensus (mufakat). Sehingga, proses ini mengutamakan pada proses konsensus sebagai instrumen organisasi ASEAN. ASEAN Five Point Consensus menjadi salah satu bentuk diplomasi Indonesia terhadap negara-negara. Akan tetapi, legalitas Five Point Consensus nyatanya dinilai lemah terhadap kepatuhan Myanmar. Di masa kepemimpinan baru ASEAN pada tahun 2022 yang diambil alih Kamboja, Kunjungan Perdana Menteri Hun Sen ke Myanmar ternyata menimbulkan polemik bagi negara-negara anggota ASEAN yang berakibat pada penangguhan pertemuan retreat antar menteri luar negeri ASEAN. Langkah yang diambil Kamboja setidaknya dapat mencairkan hubungan ASEAN dengan Myanmar pasca kudeta militer. Setidaknya, Kamboja mengundang Myanmar dalam pertemuan ASEAN dapat memberikan kesempatan untuk membangun dialog dengan pihak Tatmadaw terkait perpanjangan waktu gencatan senjata antar Tatmadaw dengan kelompok bersenjata etnis hingga akhir 2022. Dari segi bantuan kemanusiaan, AHA Centre telah menjalankan penerapan poin ke-4 dalam Lima Poin Konsensus yang disepakati ASEAN. Adapun bantuan kemanusiaan yang disalurkan AHA Center memiliki dua fase, meliputi Fase pertama (penyelematan jiwa) dengan menyediakan kebutuhan mendesak terhadap pandemi Covid-19. Fase kedua, respons dan mitigasi (penopang kehidupan) menyediakan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat Myanmar.